

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019:1) akuntansi adalah sebagai berikut:

“... ilmu mencatat, menganalisa dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan”.

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2018:27) akuntansi adalah “... proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

Menurut Dhina dan Triana (2017:1) akuntansi adalah “...proses pertanggungjawaban, dimana setiap penggunaan dan penerimaan dana pada suatu entitas harus tercatat secara memadai dan disusun laporannya.”

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan akuntansi adalah suatu sistem informasi yang meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian dan

pengikhtisaran yang didasarkan pada transaksi-transaksi keuangan yang menyediakan informasi keuangan serta kejadian ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan untuk dilakukan penilaian dan keputusan yang tepat, jelas dan tegas bagi pemakai informasi tersebut.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada 8 (delapan)

macam yaitu:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/ manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih percaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.

8. Akuntansi Organisasi Nir Laba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain.

2.1.2 Pelaporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan disebut laporan keuangan fiskal, sedangkan untuk kepentingan umum disebut dengan laporan keuangan komersial.

Menurut Harahap (2013:105), laporan keuangan secara umum adalah: "... laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu".

Menurut Fahmi (2015:2), laporan keuangan adalah: "... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut".

Menurut Kasmir (2013:7), laporan keuangan adalah: "...laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu".

Berdasarkan beberapa uraian definisi laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut

2.1.2.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik Laporan Keuangan menurut PSAK Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yaitu:

1. **Dapat Dipahami**
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. (Paragraf 25)
2. **Relevan**
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. (Paragraf 26)
3. **Materialitas**
Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. (Paragraf 29)
4. **Keandalan**
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. (Paragraf 31)
5. **Penyajian Jujur**
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam

bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. (Paragraf 33)

6. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi). (Paragraf 35)

7. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. (Paragraf 36)

8. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidak pastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal. (Paragraf 37)

9. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi. (Paragraf 38)

10. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. (Paragraf 39)

2.1.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Paragraf 12) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Irham Fahmi (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah “... memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.”

2.1.2.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 (2015:1.3) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan (Neraca) pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan

Berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, serta 38-38A.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komperatif, yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali, pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 40-40d.

Menurut Kasmir (2018:58-59) ada 5 (lima) jenis laporan keuangan,

diantaranya yaitu:

1. Neraca (*Balance Sheet*)
Merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksud adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)
Merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Modal
Menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal.
4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan
Merupakan laporan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.
5. Laporan Arus Kas
Merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk (pendapatan) dan arus kas keluar (biaya-biaya).

2.1.2.5 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan keuangan (paragraf 47) unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

1. Aktiva

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif. (Paragraf 53)

Menurut Kasmir (2018:39) aktiva dibagi menjadi dua yaitu:

a. Aktiva Lancar

Merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Komponen yang ada di aktiva lancar terdiri dari:

- a) Kas merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan dan dapat segera digunakan setiap saat
- b) Bank merupakan tempat perusahaan menyimpan uang atau menitipkan uangnya dalam bentuk simpanan.
- c) Surat-surat berharga merupakan harta perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk kertas berharga dan memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun
- d) Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Jenis piutang dibagi menjadi dua yaitu: piutang dagang adalah tagihan yang diakibatkan penjualan barang kelengkapan sedangkan piutang wesel tagih adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain karena adanya suatu perjanjian tertulis (wesel).
- e) Sediaan
Merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam suatu tempat (gudang).
- f) Biaya dibayar di muka merupakan biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh suatu barang dan jasa dari pihak lain yang akan datang.

b. Aktiva Tetap

Merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Aktiva tetap dibagi menjadi dua macam yaitu: aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik) seperti: tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya, dan aktiva tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) merupakan hak yang dimiliki perusahaan, contoh hak paten, merek dagang, *goodwill*, lisensi dan lainnya.

2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Ini

biasanya memang demikian, misalnya, dengan disertai jumlah yang terhutang dari barang dan jasa yang telah diterima. Namun, kewajiban juga timbul dari praktek bisnis yang lazim, kebiasaan dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. Kalau misalnya sebagai suatu kebijakan, perusahaan memutuskan untuk menarik kembali produknya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan tersebut merupakan kewajiban. (Paragraf 60)

Komponen *liabilities* menurut Kasmir 2018:42) terdiri dari:

- a. Utang lancar merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain karena memperoleh pinjaman (kredit dari suatu lembaga keuangan (bank).
- b. Utang dagang merupakan kewajiban perusahaan karena adanya pembelian barang yang pembayarannya secara kredit (angsuran).
- c. Utang bank merupakan sejumlah uang yang diperoleh perusahaan dari lembaga keuangan bank dan pembayarannya secara angsuran sesuai perjanjian kedua belah pihak.
- d. Utang wesel merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat adanya perjanjian tertulis yang dilakukan oleh perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu, dalam waktu tertentu pula (diatur dengan undang-undang).
- e. Utang pajak merupakan pajak perusahaan yang belum disetor ke kas Negara (pajak terutang).

3. Ekuitas

Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba (*retained earnings*), penyesuaian saldo laba dan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perusahaan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masing-masing dalam perusahaan mempunyai hak yang berbeda dalam hubungannya dengan penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal. (Paragraf 65)

4. Kinerja

Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per share*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban, dan karenanya juga penghasilan bersih (laba), tergantung sebagian pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. (Paragraf 69)

- a. Penghasilan

Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa. (Paragraf 74)

b. Beban

Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap. (Paragraf 78)

5. Laporan Arus Kas

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. (Paragraf 111)

Komponen arus kas menurut PSAK No 2 (Paragraf 5) yaitu:

- a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (*principal revenue activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- b. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak masuk setara kas.
- c. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi modal serta pinjaman perusahaan.

2.1.3 Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217) adalah: “Konsep *signaling* dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Menurut Jogiyanto (2010:387) pengertian asimetri informasi, yaitu: Asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.

Teori sinyal yang dinyatakan oleh Ross (1977), menyebutkan pihak eksekutif dari perusahaan mempunyai informasi lebih akurat tentang perusahaan, sehingga terdapat dorongan oleh pihak tersebut untuk memberikan informasi tersebut kepada calon pemegang saham serta menjadikan harga saham pada perusahaan tersebut meningkat. Signalling Theory juga menerangkan terkait kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan sinyal berupa informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan (Jama'an, 2008). Informasi yang lengkap, akurat, tepat dan relevan, hal tersebut yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan terkait investasi. Dari beberapa informasi yang diberikan, laba merupakan salah satu informasi di pasar modal yang dapat memberikan signal bagi investor (Hastutiningtyas dan Wuryani, 2019).

Pengertian asimetri informasi menurut Scott (2009:105) dalam Azhar sebagai berikut:

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the other type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry.”

Jika diartikan, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain. Azhar (2021)

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketimpangan informasi antara dua pihak yaitu pihak-pihak yang berada dalam lingkup internal dan pihak lainnya yang berada di luar perusahaan.

2.1.3.1 Jenis-Jenis Asimetri Informasi

Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul dari pada pihak lainnya.

Menurut Scott (2009:13) dalam Azhar, dua jenis asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse Selection*
Adverse selection is a type of information asymmetry where by one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.
2. *Moral Hazard*
Moral hazard is a type of information asymmetry where by one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot.

Berdasarkan pernyataan di atas *adverse selection* adalah suatu jenis asimetri informasi dimana salah satu atau beberapa pihak dalam transaksi bisnis atau transaksi potensial, mempunyai keuntungan informasi dibanding pihak yang lainnya. Azhar (2021)

Sedangkan *moral hazard* adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. Berbeda dengan *adverse selection*, dalam *moral hazard* ketimpangan informasi benar-benar merugikan pihak lainnya, karena pihak lainnya sama sekali tidak mengetahui adanya informasi khusus yang dimiliki oleh pihak lawan. Azhar (2021).

2.1.4 Teori Keagenan

Dalam akuntansi, *Agency Theory* menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*) dalam suatu perusahaan dipisahkan oleh kepentingan masing-masing pihak yaitu *principal* sebagai pemilik perusahaan yang memiliki utilitas dan *agent* diberikan wewenang untuk mengoptimalkan utilitas atau kekayaan *principal*. Pada konsep *agency theory* terdapat pemisahan fungsi antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (pengelola/manajemen perusahaan). Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terjadi konflik keagenan.

Pada Lambert (2001) dalam Sanjaya (2008) menyatakan teori keagenan sebagai berikut:

“Diperlukan kontrak kerja yang baik dan jelas antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), sehingga kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas *principal*, dan dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima *reward*. Utilitas dan *reward* tersebut didapat dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan yang tercermin dalam laba perusahaan”.

Kontrak yang diterapkan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*), sehingga mengakibatkan *principal* mendelegasikan beberapa

kewenangan kepada *agent* untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan. Jika kedua belah pihak berhubungan untuk memaksimalkan utilitas, maka ada kemungkinan *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan utama *principal*.

Menurut Sanjaya (2008) menyebutkan bahwa:

“Prinsipal menyusun desain biaya pemantauan untuk membatasi penyimpangan yang dilakukan oleh agen. Dalam beberapa hal, prinsipal akan memberi imbalan kepada agen untuk menjamin agen tidak mengambil tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi prinsipal”.

Konflik kepentingan semakin tinggi terutama karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas agen. Prinsipal tidak mempunyai cukup informasi tentang kewenangan dan kinerja yang dilakukan oleh agen, sehingga terjadi asimetris informasi. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak agen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak prinsipal yang umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).

Menurut Wijayanti (2006) menyatakan bahwa:

“Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (*book tax differences*) dapat memberikan informasi tentang kewenangan manajemen

(*management discretion*) dalam proses akrual, karena terdapat sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal”.

Dengan demikian laba fiskal tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Hanlon (2005) menyatakan bahwa:

“Apabila angka laba diduga oleh publik sebagai hasil rekayasa manajemen, maka angka laba tersebut dinilai mempunyai kualitas laba yang rendah dan kurang persisten”.

2.1.5 Book Tax Difference

2.1.5.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 dalam IAI (2019:119) pajak adalah: “... kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Waluyo (2008:2) pajak adalah: “... iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjut, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan pajak adalah kontribusi wajib bagi seluruh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan yang digunakan untuk Negara bagi kemakmuran rakyat.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Dari beberapa pengertian yang telah dibahas diatas ada beberapa fungsi pajak menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019:118) yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Fungsi *budgetair* disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan Negara terbesar.
- b. Sebagai Alat Pengatur (*Regularend*)
Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

2.1.5.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019:123) jenis-jenis pajak terdiri dari:

1. Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung
Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.
 - a) Pajak langsung (*direct tax*)
Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketepatan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh WP. Contoh pajak langsung adalah PPh dan PBB.

b) Pajak tidak langsung (*indirect tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN, dan PPnBM. Pada PPN dan PPnBM, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

2. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak Negara (pemerintah pusat/ pajak pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak Negara adalah PPh, PPN, dan PPnBM.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain PBB, BPHTB pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak hiburan.

2.1.5.4 Objek Pajak

Menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat(1) tahun 2021, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya

- termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.

Menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat (1a) tahun 2021, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

- a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

Yang dikecualikan dari objek pajak menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat (3) tahun 2021, adalah:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh

penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- f. dividen atau penghasilan lain;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
- o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan

keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

2.1.5.5 Pengertian *Book Tax Difference*

Menurut Salsabiila, Pratomo, dan Nurbaiti (2016) *Book tax differences* adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.

Menurut Djameluddin (2008) *book tax differences* merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal atau laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal

Perbedaan antara standar akuntansi dengan ketentuan pajak mengharuskan manajemen untuk menyusun dua macam laporan laba rugi pada setiap akhir periode, yaitu laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi komersial merupakan pelaporan laba yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menghasilkan laba bersih sebelum pajak (laba akuntansi), sedangkan laporan laba rugi fiskal dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perajakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (*taxable income*) atau laba fiskal.

Menurut Siti Resmi (2014:369), penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan salah satunya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan keadaan finansial. Laporan keuangan perusahaan selain ditujukan untuk kepentingan pemegang saham juga ditujukan untuk kepentingan perpajakan, sehingga untuk perhitungan pajak perusahaan harus membuat laporan keuangan fiskal. Standar yang mengatur keuangan fiskal adalah peraturan perpajakan, sedangkan standar

yang mengatur penyusunan laporan keuangan komersial adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dasar yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dapat menimbulkan terjadinya penghitungan perbedaan laba rugi perusahaan. Perbedaan itu lah yang menimbulkan istilah *book-tax differences* dalam analisis perpajakan.

Menurut Suwandika dan Astika (2013) Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi komersial dengan perpajakan menyebabkan perusahaan setiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal.

Book-Tax Differences mencakup dua laba, yaitu Laba Akuntansi dan Laba Fiskal. Menurut IAI dalam PSAK Nomor 46 tahun 2015, Laba akuntansi yaitu laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Menurut Belkaoui (2007:213) Laba Akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan pendapatan yang direalisasikan dan transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Menurut Yadiani (2010:92) secara sintaktis *Accounting Income* atau Laba Akuntansi merupakan hasil penandingan antara pendapatan dan beban, atau selisih antara pendapatan atau bebas berdasarkan pada prinsip realisasi atau aturan *matching* yang memadai. Dan menurut Yulius dan Yocelyn (2012) Laba Akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Sedangkan Menurut Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati (2015:272) Laba Fiskal merupakan laba yang dihitung berdasarkan

ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Laba fiskal ini juga dikenal sebagai laba kena pajak atau penghasilan kena pajak. Laba kena pajak ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terhutang.

Menurut IAI dalam PSAK 46 tahun 2015, laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:10):

“Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK, namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan.

Menurut Sihombing (2012:2) Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan.

Sedangkan pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:391) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Pernyataan perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal:

Menurut Siti Resmi (2019:392) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal yaitu:

1. Perbedaan prinsip akuntansi
 - a. Prinsip konservatisme.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*).
 - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat.
2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan.
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi.
 - c. Metode penghapusan piutang.
3. Perbedaan perlakuan dari pengakuan penghasilan dan biaya.
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan.
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final.
 - c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan:
 - Kerugian suatu usaha diluar negeri.
 - Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.
 - Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
 - d. Pengeluaran tertentu diakui dalam komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto.

Menurut Siti Resmi (2019:392) ada pula perbedaan penghasilan dan biaya/ pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perbedaan tetap (*permanent difference*) yakni transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tapi tidak diakui oleh pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya.
2. Perbedaan waktu/ sementara/ temporer (*time difference/ temporary difference*) yakni perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya untuk perhitungan laba. Adanya suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya.

2.1.5.6 Pengertian *Large Negative Book-Tax Differences*

Large negative book tax difference merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, perbedaan besar yang bernilai negatif ini karena laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal (Supriyono, 2013). Large negative book tax difference timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga meningkatkan penghasilan (laba) fiskal, disebabkan oleh penurunan atau penghapusan beban karena beban tersebut bukan merupakan *non-deductible expense* atau beban yang tidak boleh mengurangi penghasilan fiskal. Koreksi positif juga dipengaruhi oleh kenaikan penghasilan yang belum diakui dalam laporan keuangan komersial (Sumarsan, 2013).

Koreksi positif akan menimbulkan manfaat pajak tangguhan (*deffered tax benefits*) di laporan laba rugi dan aset pajak tangguhan (*deffered tax assets*) di neraca (Supriyono, 2013). Manfaat (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah keuntungan atau manfaat pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan

temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan (Waluyo, 2013).

2.1.5.7 Pengertian *Large Positive Book-Tax Differences*

Large positive book tax difference merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, perbedaan besar yang bernilai positif ini karena laba akuntansi lebih besar dari pada laba fiskal (supriyono, 2013). *Large positive book tax difference* timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga menurunkan penghasilan (laba) fiskal, disebabkan adanya penurunan atau penghapusan penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak atau merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final. Koreksi negatif juga disebabkan oleh kenaikan biaya yang dapat di kurangkan seperti selisih penggunaan metode penilaian persediaan, atau selisih penggunaan metode penyusutan aktiva tetap (Sumarsan, 2013). Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Waluyo, 2014).

2.1.5.8 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menyebabkan perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal setiap tahunnya. Menurut Pohan (2014:418), mendefinisikan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut:

“Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang.”

Rekonsiliasi tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan. Perbedaan tersebut dikelompokkan secara umum kedalam perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Jenis koreksi fiskal ada dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:239), Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/*non-deductible expense*—Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyusutan fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak—Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final—Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyusutan fiskal negatif lainnya.

Perbedaan permanen timbul karena adanya pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, sedangkan perbedaan temporer timbul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Perbedaan permanen dan perbedaan temporer inilah yang merupakan pembentuk *book tax differences*. Hal itu dikarenakan kedua komponen tersebut merupakan penyebab timbulnya perbedaan antara laba akuntansi atau penghasilan sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.1.5.9 Perhitungan *Book-Tax Differences*

Dalam penerapannya terdapat perbedaan prinsip atau perlakuan akuntansi dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan dua jenis penghasilan, yaitu laba akuntansi dan laba fiskal (penghasilan kena pajak). Meskipun antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak disusun atas dasar akrual, akan tetapi hasil akhir dari perhitungan tersebut besarnya tidak sama.

Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak perusahaan diperoleh dari rekonsiliasi fiskal terhadap laba akuntansi (Hanlon, 2005 dalam Djamaluddin dkk., 2008). Menurut Djamaludin (2008) yaitu perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal diskala total aset. Laba akuntansi diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih sebelum pajak kemudian laba fiskal diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih setelah pajak dalam laporan keuangan.

$$\frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Hanlon (2005) menyebutkan bahwa *book-tax differences* (BTD) dihitung dari pajak tangguhan yang dibagi total aset. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BTD} = \frac{\text{PT}}{\text{TA}}$$

Keterangan:

BTD = *Book-Tax Differences*

PT = Biaya Pajak Tangguhan

TA = Total Asset

Variabel independen ini diukur sesuai dengan penelitian Hanlon (2003) dan Suwandika dan Astika (2013), sebagai berikut:

1. *Large Positive Book Tax Difference* (LPBTD) yang diperoleh dengan cara mengurutkan perbedaan temporer diwakili oleh akun beban pajak tangguhan per tahun, kemudian seperlima urutan tertinggi dari sampel mewakili kelompok LPBTD.
2. *Large Negative Book Tax Difference* (LNBTD) yang diperoleh dengan cara mengurutkan perbedaan temporer diwakili oleh akun manfaat pajak tangguhan per tahun, kemudian seperlima urutan terendah dari sampel mewakili kelompok LNBTD.
3. *Small Book-Tax Differences* (SBTD) merupakan subsampel perusahaan sisa dari urutan setelah penentuan LNBTD dan LPBTD.

2.1.6 Tingkat Hutang

2.1.6.1 Definisi Hutang

Menurut kieso et. al (2008 :172) Menjelaskan bahwa utang merupakan kemungkinan pengorbanan masa depan atas suatu manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban pada saat ini entitas tertentu untuk memindahkan aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lampau.

Menurut munawir (2004:18) Utang adalah seluruh kewajiban keuangan suatu perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini adalah sumber dana atau modal suatu perusahaan yang berasal dari kreditor.

Menurut Hongren, et. al (2006:505) Mengungkapkan bahwa utang adalah kewajiban untuk memindahkan harta atau memberikan suatu jasa di masa mendatang.

2.1.6.2 Jenis-jenis Hutang

- a. Hutang jangka pendek (Hutang lancar)

menurut munawir (2007:18) hutang lancer atau hutang jangka pendek merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Contoh-contoh hutang jangka pendek sebagai berikut:

1. Hutang dagang
2. Hutang wesel
3. Dividen
4. Utang biaya
5. Pendapatan di terima di muka

b. Hutang jangka Panjang (Hutang tidak lancer)

Riyanto (2011:238) kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang tidak akan dilikuidasi dengan aktiva lancar dalam siklus operasi yang normal, melainkan akan dibayar pada tanggal di luar waktu itu. Contoh-contoh hutang jangka panjang sebagai berikut:

1. Hipotek
2. Hutang obligasi
3. Wesel bayar jangka panjang
4. Kewajiban lease
5. Pasca pension
6. Perjanjian dengan pembayaran angsuran

2.1.6.3 Definisi Tingkat Hutang

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:61), rasio solvabilitas atau tingkat hutang adalah:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang dimaksud seperti piutang dan modal maupun aktiva”.

Menurut Irham Fahmi (2015:72), rasio tingkat hutang adalah rasio yang digunakan untuk:

“... mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *tingkat hutang ekstrim* yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut”.

Menurut Kasmir (2016:151), tingkat hutang adalah:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio tingkat hutang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat hutang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar perusahaan lebih bergantung kepada pinjaman luar, daripada membiayai asetnya dengan modal sendiri.

2.1.6.4 Tujuan dan Manfaat Tingkat Hutang

Menurut Kasmir (2012:153), terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio tingkat hutang adalah:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban

- kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
 3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
 4. Untuk menilai seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang;
 5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
 6. Untuk menilai dan mengukur berapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
 7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki;
 8. Dan tujuan lainnya”.

Selain itu manfaat rasio tingkat hutang menurut Kasmir (2012:154) adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri;
8. Dan manfaat lainnya”

2.1.6.5 Jenis-Jenis Pengukuran Rasio Tingkat Hutang

Jenis-jenis rasio *leverage* yang dapat digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya menurut Kasmir (2016:157) yaitu:

a. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*):

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset}$$

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*):

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengukur besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan.

$$\begin{aligned} & \textit{Long Term Debt to Equity Ratio} \\ & = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}} \end{aligned}$$

d. *Times Interest Earned Ratio*

Times Interest Earned Ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Cara menghitungnya adalah dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga dengan biaya bunga.

$$\textit{Time Interest Eaerned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga}}{\text{Beban Bunga}}$$

e. *Coverage Ratio*

Coverage Ratio merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana atauberapa kali kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba operasional boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban.

$$\textit{Coverage Ratio} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Kewajiban}}$$

2.1.7 Persistensi Laba

2.1.7.1 Pengertian Laba

Setiap perusahaan profit oriented menginginkan laba atau keuntungan untuk dapat terus bertahan dalam perekonomian serta demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Dwi Martani (2012:113) menyatakan bahwa pengertian laba merupakan pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial (uang) dari asset neto pada akhir periode (di luar distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi asset neto pada awal periode.

Laba digunakan sebagai ukuran kinerja dan dasar bagi ukuran kinerja investasi (*return on investment*) atau kinerja saham dengan melihat laba per saham (*earning per share*) (Dwi Martani, dkk. 2012: 43). Informasi kinerja perusahaan yang tercermin pada informasi laba di laporan laba rugi komprehensif merupakan informasi yang penting dilihat oleh investor dalam pengambilan keputusan mengenai investasi atau kredit, dan juga informasi untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan (Dwi Martani, 2012: 113).

Menurut pemahaman penulis, berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan bahwa laba merupakan keuntungan dari selisih pendapatan dikurangi beban dan hal lainnya, yang dapat menjadi pengukur kinerja perusahaan serta membantu dalam kelangsungan hidup perusahaan.

2.1.7.2 Jenis-jenis Laba

Menurut Harhap (2009) dalam budi(2020) Terdapat 4 jenis laba atau penghasilan dalam akuntansi sebagai berikut:

1. Laba kotor penjualan

Jenis penghasilan yang pertama adalah laba kotor penjualan yang merupakan selisih dari harga pokok penjualan dan penjualan bersih.

Penghasilan kotor ini juga belum dikurangi dengan jumlah beban operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2. Laba operasional

Jenis selanjutnya adalah penghasilan bersih operasional yang merupakan pengurangan penghasilan kotor penjualan dengan semua biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya operasional lainnya.

3. Laba sebelum pajak

Selanjutnya ada jenis penghasilan bersih sebelum pajak. Hal ini juga disebut dengan *Earning Before Tax* (EBIT) yang merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseroan.

4. Laba sesudah pajak

Jika sebelumnya ada jenis penghasilan bersih sebelum pajak, maka jenis selanjutnya yaitu penghasilan bersih setelah pajak.

Jenis ini bisa diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan.

2.1.7.3 Kualitas Laba

Menurut Schipper dan Vincent (2009) dalam Kresna (2021) Kualitas laba adalah jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode tetap sama.

Menurut Subramanyam (2014) dalam Kresna (2021) kualitas laba adalah laba yang mempunyai stabilitas dan prediktabilitas dalam menilai laba dan arus kas di masa mendatang.

Menurut Schroeder et al (2015) dalam Kresna (2021) mendefinisikan kualitas laba sebagai tingkat korelasi antara pendapatan akuntansi perusahaan dan pendapatan ekonominya. Ciri ciri laba yang berkualitas sebagai berikut:

1. Mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat.
2. Mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masadepan.
3. Dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai kinerja perusahaan.

2.1.7.4 Pengertian Persistensi Laba

Menurut Afid Nurocman dan Badigantus Solikhah (2015) pengertian persistensi laba adalah sebagai berikut:

“Persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada pandangan bahwa laba yang lebih sustainable adalah laba yang memiliki kualitas yang lebih baik”.

Adapun Aulia Eka Persada dan Dwi Martani (2010) mendefinisikan persistensi laba adalah sebagai berikut:

“Persistensi laba adalah kemungkinan laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang (*expected future earnings*) yang tercermin pada laba tahun berjalan (*current earnings*). Semakin tinggi kemungkinan laba akuntansi di masa depan yang tercermin dari laba tahun berjalan, maka laba memiliki persistensi yang tinggi. “

Laba persisten menggambarkan kualitas laba yang diperoleh perusahaan karena perusahaan dapat mempertahankan perolehan laba tersebut dari waktu ke waktu dan bukan karena suatu peristiwa tertentu (Dodik Juliardi, 2013).

Menurut pemahaman penulis, berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan bahwa persistensi laba merupakan laba yang dapat bertahan dilihat dari laba tahun berjalan yang stabil, sehingga laba tersebut dapat mencerminkan kinerja perusahaan dimasa sekerang dan juga dimasa yang akan datang.

2.1.7.5 Pengukuran Persistensi Laba

Menurut Muhammad Khafid (2012) persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada pandangan bahwa laba yang lebih sustainable adalah laba yang memiliki kualitas yang lebih baik. Pengukuran persistensi laba yang digunakan menggunakan koefisien regresi dari earning per share periode yang lalu terhadap earning per share periode sekarang.

Sedangkan menurut Tri Junawatiningsih (2014) persistensi laba menggambarkan koefisien dari regresi pendapatan operasional sekarang terhadap pendapatan operasional tahun sebelumnya. Hasil koefisien regresi tinggi (mendekati angka 1) maka hal ini menunjukkan persistensi laba dan apabila sebaliknya (koefisien regresi mendekati nol) persistensi laba dikatakan rendah. Jika koefisien bernilai negatif, hal ini mengartikan hasil sebaliknya. Negatif mendekati angka 1 maka persistensi laba rendah, sedangkan negative mendekati angka nol menunjukkan tingginya persistensi laba. Pengukuran persistensi laba menurut Tri Junawatiningsih (2014) adalah sebagai berikut:

$$PO = \beta_0 + \beta_1 PO_{t-1} + \varepsilon$$

Keterangan:

PO = Laba operasional perusahaan tahun t

β_1 = Koefisien regresi persistensi laba

ε = Residual error

Pot-1 = Laba operasional perusahaan tahun t-1

Pengukuran persistensi laba diproksikan dengan nilai koefisien regresi antara laba operasional periode sekarang dengan laba operasional periode yang lalu yang selanjutnya dikalikan dengan logaritma natural laba operasional tahun lalu. Laba operasi dijadikan ukuran persistensi yang tinggi dikarenakan laba operasi merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. (Tri unawatiningsih, 2014)

Menurut penelitian Afid Nurochman dan Badigantus Solikhah (2015) persistensi laba diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EPS_{jt} = \alpha + \beta EPS_{jt-1}$$

Keterangan:

EPS_{jt} = Earning Per Share Tahun t

EPS_{jt-1} = Earning Per Share Tahun t-1

A = Konstanta

β = Persistensi Laba

Menurut penelitian Satya Sarawar dan Nicken Destriana (2015) persistensi laba diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Earnings_{t+1} = \alpha + \beta_1 Earnings_t + \epsilon_t$$

Keterangan:

Earnings_{t+1} = laba operasi periode t+1 dibagi rata-rata asset

β₁ = ukuran persistensi

Earnings_t = laba operasi periode t dibagi rata-rata asset

ε_t = error term

Laba operasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya laba positif karena penelitian ini tidak menggunakan variable control yaitu *loss*. Nilai dari slope β₁

merupakan nilai dari persistensi laba. Semakin positif dan besar pada nilai β_1 , berarti laba sekarang semakin terpengaruh oleh laba masa lalu.

Persada (2010) dalam Salsabiila, Pratomo dan Nurbaiti (2016) mengukur persistensi laba dengan perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya dikurangi laba sebelum pajak tahun berjalan dibagi dengan total aset. Apabila persistensi laba (PRST) > 1 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan *high* persisten, apabila persistensi laba (PRST) > 0 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tersebut persisten. Sebaliknya, apabila persistensi laba (PRST) ≤ 0 berarti laba perusahaan tidak persisten dan fluktuatif. Perusahaan-perusahaan yang memiliki laba yang persisten memiliki karakteristik bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan jumlah laba sepanjang tahun dan adanya perubahan atau revisi laba pada tahun berikutnya dimana laba tersebut meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Sebaliknya perusahaan-perusahaan yang memiliki laba tidak persisten memiliki karakteristik laba perusahaan yang tidak konsisten dan berfluktuatif setiap tahunnya.

$$PRST = \frac{\text{Laba sebelum pajak}_{t-1} - \text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Sedangkan menurut Kormendi dan Lipe (1987) dalam penelitian Bitu Mashayekhi dan Mohammad S.Bazaz (2010) pengukuran persistensi laba menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{EARN}{TA_{i,t-1}} = \lambda_0 + \lambda_1 \frac{EARN}{TA_{i,t-1}} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

EARN = laba bersih perusahaan sebelum item luar biasa

TA = Awal tahun total asset

$\epsilon_{i,t}$ = error dalam tahun t

λ_1 = persistensi

Penelitian ini melakukan estimasi Ordinary Least Square (OLS) pada model 1 untuk setiap tahun. Nilai estimasi λ_1 (selanjutnya disebut PERS) mendekati atau lebih dari satu (1) menunjukkan persistensi laba yang tinggi, sementara nilai mendekati nol (0) mencerminkan laba yang sangat sementara. Laba persisten lebih baik daripada laba transitory karena laba persisten lebih stabil dan dapat diprediksi di masa depan.

Adapun dalam penelitian Dodik Juliardi (2013) pengukuran laba persisten mengikuti pengukuran Kormendi dan Lipe (1987); Easton dan Zmijweski (1989). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$X_{it} = \alpha + \beta X_{it-1} + e$$

Keterangan:

X_{it} = Laba perusahaan i pada tahun t

X_{it-1} = Laba perusahaan i pada tahun t-1

α = Konstanta

β = Koefisien

Pada penelitian ini untuk mengukur persistensi laba penulis menggunakan rumus menurut Persada (2010) dalam Salsabiila, Pratomo dan Nurbaiti (2016) dengan cara mengukur persistensi laba dengan perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya dikurangi laba sebelum pajak tahun berjalan dibagi dengan total aset. Berikut rumusnya :

$$PRST = \frac{Laba\ sebelum\ pajak_{t-1} - Laba\ sebelum\ pajak}{Total\ Aset}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

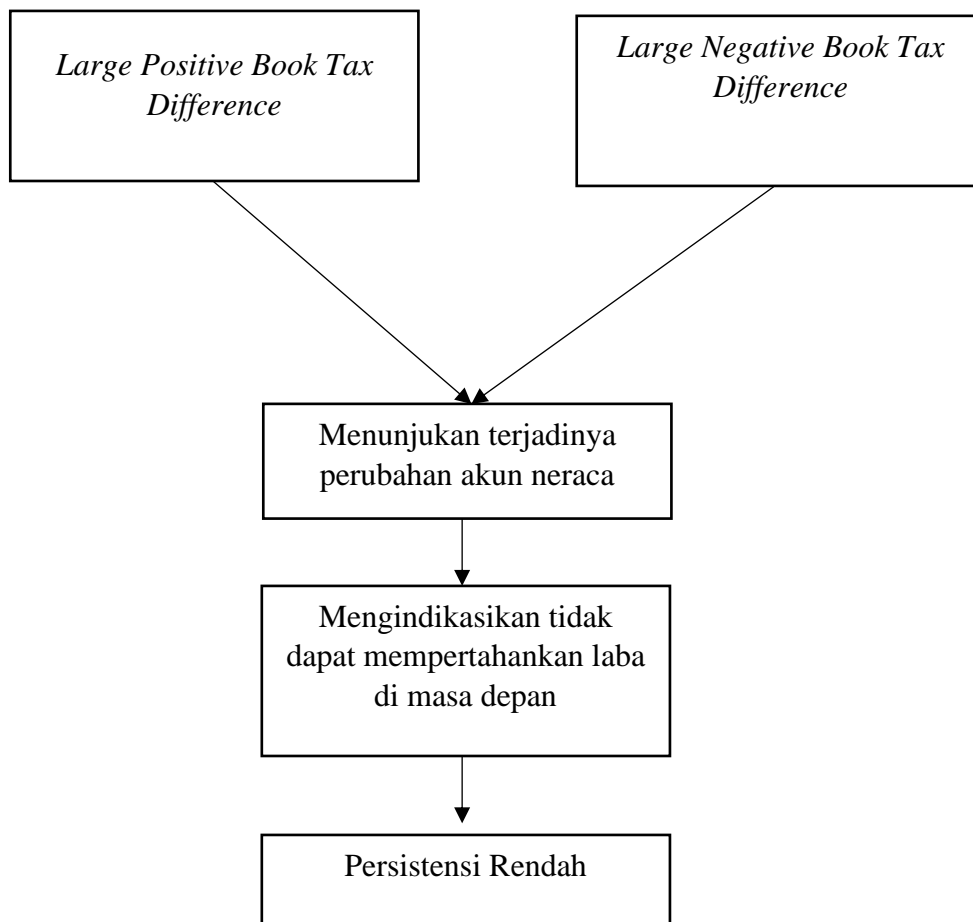
2.2.1 Pengaruh Book Tax Difference terhadap Persistensi Laba

Hanlon (2005) dalam Fatkhur (2013) large positive book-tax differences dan large negative book-tax differences diduga mempunyai kuliatas laba yang rendah dan kurang persisten karena munculnya saldo aktiva (kewajiban) pajak tangguhan harus ditelusuri lebih lanjut, karena perubahan dalam hubungannya dengan akun neraca memungkinkan digunakan sebagai satu cara untuk merekayasa (menaikan atau menurunkan) laba secara semu dalam kebijakan manajemen (management discretion), sehingga large positive dan negative book-tax differences secara bersama-sama mengindikasikan tidak dapat mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa yang akan datang.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rima Ayu Kusuma Wardhani (2013), I Made Andi Suwandika dan Ida Bagus Putra Astika (2013), Fitria Jumiati dan Ni Made Dwi Ratnadi (2014), Ni Putu Lestari Dewi dan Asri Dwija Putri (2015), Azzahra Salsabila S, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti

(2016), Ratri Annisa dan Lulus Kurniasih(2017), Rudy Irwan Gunarto (2019), Imam Hidayat dan Syifa Fauziah (2020), Mursyidati Winda Ramadharni (2022) yang menyebutkan bahwa *book tax difference* berpengaruh terhadap persistensi laba.

Kerangka pemikiran pengaruh *book tax difference* terhadap persistensi laba dapat dilihat pada gambar 2.1



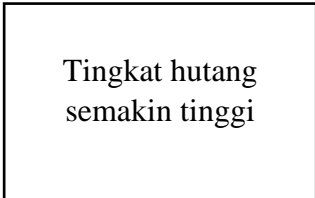
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran *Book Tax Difference*

2.2.2 Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Persistensi Laba

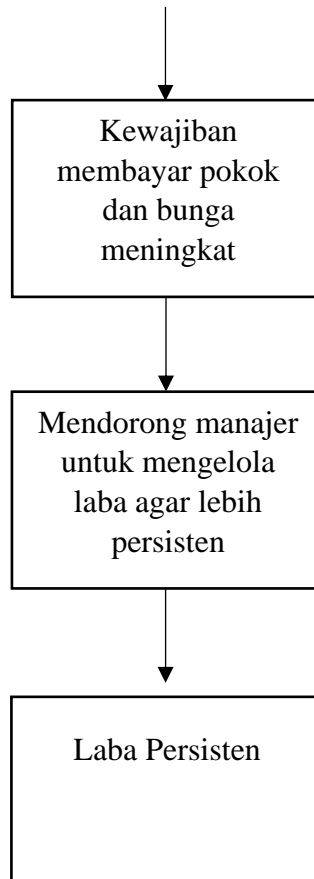
Menurut (Kasmir 2012:156) Leverage merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran apabila rasionya tinggi artinya pendanaan dengan utang semakin banyak maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Dengan demikian pula apabila rasionya rendah semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Oleh karena itu, pada saat tingkat leverage tinggi akan mendorong manajer untuk menjaga labanya tetap persisten dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik di mata kreditor.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Andi Suwandika dan Ida Bagus Putra Astika (2013), Linawati (2015), Afid Nurochman dan Badingatus Solikhah (2015), Padri Achyarsyah dan Asri Jumi Purwanti (2018), Rudy Irwan Gunarto (2019), Yulira Gusnita dan Salma Taqwa (2019), Imam Hidayat dan Syifa Fauziah (2020), Mega Indriani dan Henrych Wilson Napitupulu (2020), yang menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap persistensi laba.

Kerangka pemikiran pengaruh tingkat hutang terhadap persistensi laba dapat dilihat pada gambar 2.2



Tingkat hutang
semakin tinggi



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Tingkat Hutang

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis adalah:

“... jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis menurunkan (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Book Tax Difference* berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba.

H2 : Tingkat Hutang berpengaruh signifikan terhadap Persisten Laba.